



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRIATNA SASMITA
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 411331

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 810.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/32 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 313.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOBIL, SUZUKI JEEP Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 32.185.210

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.155.185.210



III. HUTANG

Rp. 28.473.600

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.126.711.610

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Happy Three Agustiwi
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 402356

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 351.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 151.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1. MOBIL, Terios TX Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, Honda NF 125 TR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, Yamaha 5TL MIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 150.429.652

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 627.429.652

III. HUTANG Rp. 150.580.500

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 476.849.152

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : AHMAD HUSEN
- Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
- NHK : 789678

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	295.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/30 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	13.300.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.300.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.000.613
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	312.300.613
III. HUTANG	Rp.	130.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	182.300.613

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUKRIA**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**
3. NHK : **196450**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 885.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/40 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1602 m2/100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 485.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 19.000.000

1. MOTOR, HONDA CB150 R SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 400.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 19.096.902

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 923.496.902

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 923.496.902

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUTANTO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 206804

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m²/45 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 102.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOBIL, SUZUKI KATANA SHORT 2WD GX Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 37.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.178.222

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 954.678.222

III. HUTANG Rp. 18.250.000

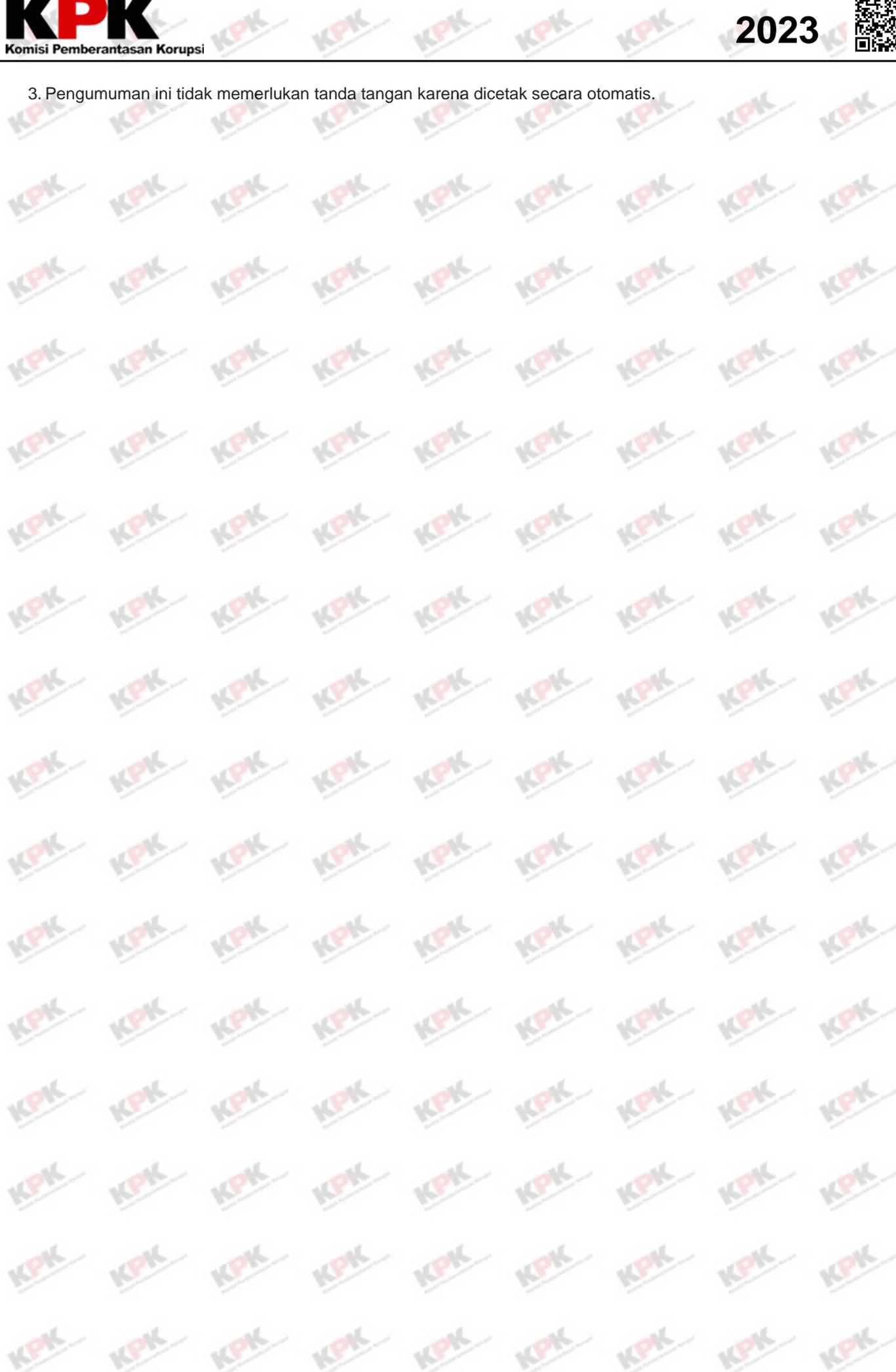
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 936.428.222

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**I. DATA PRIBADI**

- Nama : EMAN PATUROHMAN
- Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
- NHK : 884093

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 550.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/80 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 50.500.000

- MOBIL, ETIOS VALCO MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
- MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.050.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 23.298.889**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 624.848.889**III. HUTANG** Rp. 126.500.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 498.348.889**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.